

KRITIK SOSIOLOGIS PEMISAHAN GEREJA DAN NEGARA DALAM DOKTRIN GEREJA BAPTIS DI INDONESIA

Oleh Suroso

A. Pendahuluan

Dalam sejarah umat Baptis di Indonesia yang bergabung dalam Gabungan Gereja Baptis Indonesia (GGBI), belum dijumpai Kritik yang komprehensif dalam praktik bergereja baptis di Indonesia. Hal itu dapat dimaklumi karena sejak Gereja Baptis Amerika Selatan (*Southern Baptist*) mengirim misionaris ke Indonesia 30 tahun lalu yang bekerja di GGBI, belum terbiasa pada tradisi kritik. Setelah GGBI mengorganisasikan diri pada 1971, 30 tahun kemudian baru muncul tradisi kritik, tepatnya otokritik yang jarang dilakukan oleh pendeta dan umat Baptis.

Pdt. Budi Suwondo, seorang pendeta Baptis berani menyuarakan kritik terhadap GGBI berkait dengan pengelolaan gereja yang tidak berdasarkan ajaran gereja.¹ Suatu otokritik terhadap gereja Baptis berkait dengan pengelolaan gereja Baptis yang bukan gereja, tetapi organisasi gereja dan memungut sumbangan tetap dari anggotanya. Kritik yang mendasar adalah, sebagai gereja otonom gereja Baptis Indonesia, masih terjadi stratifikasi dalam berorganisasi seperti keberadaan Badan Perwakilan Daerah (BPD), Badan Perwakilan Pusat (BPP) yang lazim dipakai dalam organisasi khas nongereja.

Kritik lain menyatakan bahwa GGBI bukan lembaga politik, melarang pendeta berdemonstrasi, tetapi beberapa pengurusnya mempraktikkan *bad politic* dalam berorganisasi, bukan politik yang sesungguhnya, sebagai panggilan profetis gereja di tengah kemerosotan moral bangsa, melainkan politik untuk mencari kedudukan di lembaga rohani. Pihak lain yang melakukan *counter politic* dianggap tidak rohani. Kenyataan ini merupakan pembodohan umat, menutup sejarah buruk, dan sangat memprihatinkan karena GGBI adalah lembaga rohani.²

Mengutip paradigma beregereja Niebuhr³, dalam konteks beregereja di Indonesia tampaknya tidak dapat lepas dari budaya, yang dalam konteks GGBI adalah Indonesia, bukan konteks budaya Amerika sebagai cikal bakal gereja Baptis di Indonesia. Dalam bahasa etika, menyandarkan hukum, termasuk dogma gereja Baptis, sebagai satu-satunya sumber formal yang menyebabkan legalisme

¹ Budi Suwondo, "Menjadi Gereja Baptis Indonesia Kontekstualisasi Setengah Jalan" dalam *Menjadi Gereja Baptis Indonesia*, Bandung: LLB, 2001. Hal 275.

² Ibid. hal 286.

³ Niebuhr, Richard, *Christ and Culture*, New York:Harper Torchbook, 1956. Hal 83-115.

hukum hanya menyentuh aspek jasmaniah yang tidak rohaniah sangat berbahaya. Dengan kata, lain diperlukan kontekstualisasi bergereja yang bersinergis dengan kekuatan budaya.

Hubungan antara Injil dan kebudayaan ada garis yang akomodatif dan radikal. Bagi yang akomodatif terhadap kebudayaan, injil merupakan mediasi untuk meminimalkan yang negatif, sedang yang berpandangan radikal hanya injil satu-satunya jalan keselamatan.

Dalam praktik bergereja Baptis di Indonesia, tidak sedikit dijumpai fakta-fakta yang bersentuhan dengan kebudayaan seperti praktik perkawinan, kematian, sunat, dan tradisi lain yang tidak lepas dari kehidupan orang kristen Baptis sebagai bagian dari bangsa dan kebudayaan Indonesia. Semua yang berkaitan dengan itu, seringkali membingungkan dan tidak jarang hanya berupa dogma hitam-putih” atau semacam fatwa yang harus diikutinya. Lembaga agama Kristen atau institusi gereja Baptis juga jarang memberikan fatwa hubungan Injil dan kebudayaan. Lebih ironis lagi, terdapat perbedaan budaya yang signifikan antara tradisi baptis di *Southern Baptist* Amerika yang dibawa misi Amerika ke gereja Baptis di Indonesia. Pertemuan antara dua budaya dalam membentuk gereja Baptis di Indonesia ini seharusnya mengakomodasi perbedaan budaya tanpa mengurangi kebenaran Injil.

Artikel ini berusaha untuk memaparkan dan menganalisis doktrin Baptis dengan menggunakan pendekatan sosilogis yang memanfaatkan paradigma H . Richard Niebuhr, khususnya butir pemisahan gereja dan negara seperti salah satu yang tercantum dalam doktrin Baptis. Ada tiga persoalan pokok yang telah dilakukan oleh GGBI dalam hubungan yang kontradiktif keyakinan keyakinan Baptis yaitu pemisahan gereja dan negara. *Pertama*, memberi persetujuan asas tunggal Pancasila yang merupakan bentuk ketaatan gereja Baptis pada negara. *Kedua*, kekhilafan umat baptis menolak eksistensi Saksi Yehofa dalam kegiatan bergereja di Indonesia, sama seperti yang dilakukan oleh orang Islam terhadap keberadaan Ahmadiyah. *Ketiga*, penyerahan emas, kepada Presiden Soeharto pada 1998, yang merupakan dukungan politik kepada rejim penguasa yang merupakan bentuk persetujuan gereja kepada negara.

B. Sejarah dan Doktrin Gereja Baptis

Para pendiri gereja Baptis adalah para pendeta gereja Baptis di Inggris yang memiliki berbagai latar belakang sekular sebelum mereka memasuki dunia kegerejaan. Hanset Knollys (1599-1691) adalah seorang puritan yang kemudian menjadi separatis. Ia mendapat simpati secara diam-diam dari bangsawan dan akhirnya memunculkan perselisihan dengan pemerintah yang membawanya beberapa kali ke penjara. Benjamin Keach (1640-1704) seorang peneliti. Ia diadili karena bukunya yang bertentangan dengan *common prayer*. Keach dihukum di depan umum dan salinan semua bukunya dibakar. Andre Fuller (1754-1815) mantan pegulat yang mengemukakan Teologi Calvinis di kalangan umat Baptis. Dan Taylor (1738-1816) mantan pekerja tambang yang menganggap pentingnya pendidikan bagi para pendeta. Latar belakang Methodisnya dan perhatian aliran ini terhadap kebangkitan membekali kekuatan dalam penginjilan. Roger William (1599-1683), seorang radikal dan berhaluan keras yang menyiapkan diri untuk menjadi pendeta gereja Anglikan. Selain tokoh-tokoh di atas, terdapat pula John Clark M.D ((1609- 1676), Obadiah Holmes (1606-1682), Issac Bauckus (1724-1806), Morgan Edward (1722-1795), dan John Bunyan (1628-1668). Pada umumnya, mereka mendapat tekanan di Inggris saat Ratu Marry berkuasa (1553-1558), melarikan ke Amerika Serikat dan mengembangkan gereja Baptis di sana. Sebagian lagi dari merere juga lari ke Belanda.⁴

Pada awalnya, munculnya gereja Baptis akibat tekanan dari pemerintah dan mereka pada umumnya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda seperti dalam upacara pempabtisan, tidak memiliki *bishop* dan dalam melaksanakan ibadah pemimpinnya dari kalangan orang biasa, karwayan atau pegawai, penatua, maupun gembala sidang. Beberapa gereja memperbolehkan membentuk persekutuan dan mencari pengikut atau jemaatnya. Persekutuan tersebut merupakan konvensi dan ajang hubungan persaudaraan.

Umat Baptis juga dikaitkan dengan stigma radikal para pengikutnya. Hal ini dikaitkan dengan kelompok radikal Munster abad 16. Mereka mengajak orang untuk menjadi pengikut Baptis. Kebanyakan orang Baptis lebih banyak memilih dibaptis dengan cara selam di air sungai yang mengalir sebagai penolakan terhadap pembaptisan dengan air kolam yang tersedia dalam gereja. Umat baptis

⁴ “A Special Issue Devoted to The Baptist, A People who Gathered to walk in His Way” dalam *Christian History*, Vol IV. No 2, Yogyakarta: Laksbang. 2005, Hal. 45-66.

mula-mula memiliki tradisi dan kebiasaan yang bermacam-macam khususnya dalam mengekspresikan kebebasan.

Sampai saat ini, sangat sulit untuk membuat generalisasi ajaran gereja Baptis. Sebagai contoh, ada pengikut yang mempraktikkan okumene dan yang lain tidak melakukan. Ada yang menggunakan prinsip ajaran gereja pada umumnya, sedang yang lain tidak menggunakan. Ada yang mengakui adanya pembaptisan, sementara yang lain tidak mengakuinya. Sebagian orang baptis mengizinkan penggunaan alat-alat musik lengkap dalam kebaktian sementara ada yang melakukan hanya dengan menyanyi saja.

Praktik gereja Baptis mula-mula di Inggris yang dibawa oleh para pendeta ke Amerika akibat tekanan Ratu Marry tersebut mengakar dalam kebudayaan awal Amerika, maksudnya orang-orang Inggris yang melakukan kolonialisasi di Amerika, yang mengekspresikan kebebasan dan hak asasi manusia di tanah baru yang bernama Amerika. Ajaran penghormatan dan kebebasan ini yang mengilhami ajaran gereja, khususnya dogma pemisahan antara gereja dan negara. Artinya, orang-orang Baptis di Amerika tidak mengulang kembali ororitas negara yang besar dalam mengatur gereja seperti yang terjadi di Inggris.

Dalam perjalanan misi ke Indonesia yang dilakukan oleh para misionaris dari *Southern Baptist Convension (SBC)*, hibrida gereja baptis baru muncul di Indonesia. Lebih dari lima puluh tahun pelayanan misi Baptis Amerika ini mengalami dinamika, adanya pasang surut hubungan misi Amerika dengan misionaris Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Presiden Misi Internasional Southern Baptist Convension (SBC Jerry Rankin.⁵ Akibat disharmoni antara misionaris Amerika dan misionaris Indonesia yang menghendaki kontekstualisasi bergereja akibat penduduknya yang 64% miskin dan mendapat tekanan negara, maka pada 1971 gereja baptis Indonesia yang tergabung dalam GGBI mengikat dalam keluarga besar baptis yang terlepas dari peran misionaris Amerika.

Persoalan sekarang yang muncul adalah bahwa tradisi Amerika dalam bergereja masaih melekat di sebagian gereja Baptis dan dipihak lain ada gereja Baptis yang menghendaki kontekstualisasi dalam bergereja di Indonesia. Salah satu agenda besar yang dihadapi umat Baptis adalah berkait dengan doktrin kepemimpinan gereja. Belum ada keputusan final dari kongres gereja untuk

⁵ Rankin, Jerry, "Partnership out of Conflict The Evolving Relationship between GGBI and MBI" dalam *Menjadi Gereja Baptis Indonesia*. Jakarta: LLB, 2001, Hal 43-47.

mengizinkan perempuan menjadi diakon, apalagi untuk menjadi pendeta atau gembala sidang di gereja Baptis.⁶ Persoalan kedua, persoalan yang berkaitan dengan etos kemanusiaan adalah persoalan misi penginjilan yang sering kali berbenturan dengan masalah kebudayaan. Artinya, proses pengabaran injil seperti yang menjadi keharusan dalam gereja baptis tanpa memperhatikan konteks kebudayaan dan keyakinan di Indonesia. Penginjilan tanpa usaha menegakkan keadilan tidaklah utuh. Mengakui Allah tetapi melupakan perjuangan keadilan dan pembebasan adalah sama saja dengan mengaku mencintai Allah tanpa mencintai manusia.⁷

Tampaknya kongres Gereja yang dilakukan Umat Baptis sampai ke delapan kali dan lebih dari 30 tahun mengorganisasikan diri dalam GGBI masih menyisakan berbagai agenda berkait dengan masalah asas kepercayaan, peran perempuan dalam kepemimpinan, dan kewenangan pemimpin gereja untuk melakukan upacara gereja dan upacara yang berkait dengan gereja seperti perkawinan, kematian, pemberkatan bayi, pemberkatan usaha pertanian, perdagangan, dan lain-lain belum sepenuhnya dijawab sesuai dengan konteks bergereja di Indonesia.

C. Peran Gereja dalam Masyarakat

Max Weber menjelaskan apa yang disebut “semangat” dalam mendasari tindakan ekonomi yang bersikap kecapitalis.⁸ Weber bertolak dari pendekatan metodologis yang disebut *verstehen* (memahami) tentang substansi yang dihadapi. *Verstehen* merupakan suatu metode pendekatan yang berusaha mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial secara historis. Pendekatan *verstehen* bertolak dari gagasan bahwa tiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh para aktor atau peserta yang terlibat dalam situasi yang bersangkutan.

Dengan cara itu Weber mencoba menangkap secara keseluruhan nilai-nilai yang dipantulkan oleh Protetanisme, khususnya Calvinis yang puritan. Pada penerimaan nilai yang berbeda-beda itu, Weber mendapatkan bahwa keduanya antara gereja dan masyarakat “saling menemukan” dan “saling memperkuat”,

⁶ Minit Kongres VIII Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Yogyakarta: GGBI, 7-11 Maret 2005. Hal. 207

⁷ Banawiratma, J.B., *10 Agenda pastoral Transformatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hal 21

⁸ Weber, Max, *Etika Protestan dan Kapitalisme*, Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000. Hal. 72-116.

afinitas (kesesuaian). Semangat bergereja dan tindakan ekonomi menghasilkan suatu tindakan tertentu. Dengan kata lain agama mempunyai tindakan dan tindakan merupakan dasar agama. Iman tanpa perbuatan adalah kematian.

Gagasan Weber tersebut, sesungguhnya tidak terlalu paradok dalam praksis bergereja di kalangan umat Baptis Indonesia. Spritualitas yang ditumbuhkan umat Baptis tentang kewajiban mengabarkan injil dengan tidak menelantarkan kehidupan. Semangat kerja keras untuk mencari harta benda untuk memuliakan Tuhan dengan pemberian terbaik merupakan semangat ajaran kapitalisme.

Oleh karena itu, membuang-buang waktu merupakan dosa pertama dan secara prinsip merupakan dosa yang paling mematikan. Rentang waktu kehidupan manusia secara tidak pasti adalah pendek dan berharga untuk memastikan pilihan hidup seseorang. Kehilangan waktu melalui sosialitas, pembicaraan tidak menentu, kemewahan, bahkan tidur terlalu banyak dari yang semestinya (6 jam paling banyak 8 jam) merupakan jenis kesalahan-kesalahan moral absolut.⁹

Kegiatan bergereja, dengan memberikan persepuluhan secara tertib, mengikuti ibadah dengan rutin dalam bentuk persekutuan gereja atau okumene, melayani mereka yang miskin, mendoakan mereka yang memiliki beban berat karena perkosaan, perampokan, kebakaran, dll,ewartakan injil memang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya Yesus, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Persoalannya, apakah semua orang Kristen dapat melakukan kegiatan bergereja seperti yang disebutkan di atas? Tidakkah orang Kristen (di Indonesia) terikat juga dengan pekerjaannya berkaitan dengan kebutuhan nafkah keluarga seperti membesarkan dan membiayai pendidikan anak dan bersosialisasi dengan lingkungan? Dapatkah orang Kristen memiliki semangat kerja untuk bisa memuliakan Tuhan dengan hartanya. Tidakkah gereja Baptis juga butuh uang dari pekerjaan umat untuk manajemen gereja, mengasahi orang miskin dan terlantar dalam kegiatan berdiakonia. Penedeknya, etos kapitalisme Weber juga menjadi pertimbangan umat Baptis untuk dapat memuliakan Tuhan dengan talenta dalam berbagai kegiatan pekerjaan di gereja, masyarakat, dan negara.

Kesadaran bergereja di Indonesia selaras dengan ciri penting kehadiran gereja Baptis sebagai gereja bangsa. Menurut Kyoung Bae Min, seorang Presbiterian dari Universitas Yonsei di Seoul, menyebutkan bahwa ciri penting gereja-gereja di

⁹ Ibit. Hal 230.

Korea tertetak dalam identifikasi mereka dengan negara dan bangsa. Kesadaran misi mereka diperdalam oleh rasa kewajjian yang mendalam untuk berdiri demi keselamatan bangsa. Kesadaran misi ini pertama-tama diperlihatkan dalam masa-masa gelap sejarah Korea pada masa pendudukan Jepang, ketika gereja-gereja pun terpanggil untuk menderita dan berjuang atas nama rakyat korea.¹⁰

Dalam konteks bergereja di Indonesia, tidakkah penderitaan rakyat Indonesia seperti bencana tsunami di Aceh dan gempa bumi di Nias, Nabire, dan bencana tanah longsor serta kekeringan yang menewaskan ribuan orang di Indonesia tidak menjadi agenda gereja dalam masyarakat? Kasus kelaparan yang menewaskan 55 orang dan 125 orang dirawat di rumah sakit seperti yang baru saja terjadi di kabupaten Yahukimo merupakan kealpaan negara dalam mengurus rakyat.¹¹ Dalam hal ini peran sosial gereja amat diperlukan dalam meringankan masyarakat bangsa yang ada di daerah bencana.

Mungkinkah orang-orang baptis yang bergabung dalam GGBI akan berdiam diri ketika negara tidak mampu menciptakan pendidikan yang baik dan merata, proses pembodohan masih terjadi di mana-mana, kemiskinan makin melimpah ruah dengan kebijakan yang tidak pernah berpihak pada orang-orang miskin. Tidakkah ajaran gereja utama dalam mengasahi mereka yang miskin dan menderita. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Baptis mampu menggelorakan iman dengan tindakan nyata memerangi kemiskinan dan kebodohan yang merupakan agenda diakonal yang bermuara pada pendidikan dan keimanan.

D. Paradok Pemisahan Gereja dan Negara dalam Gereja Baptis di Indonesia

Pemisahan gereja dan negara dalam gereja Baptis masih menjadi persoalan bagi umat baptis di Indonesia. Kisah pemisahan gereja dan negara yang merembet pada gereja baptis merupakan buah pemikiran Thomas Helwys dalam bukunya *A Short Declaration of Mistery iniquity* (1962) yang berisi permohonan kebebasan beragama kepada Raja James.¹² Senada dengan Helwys, Thomas William, Roger William, bahwa Tuhan tidak membutuhkan keseragaman beragama yang

¹⁰ Yewangoe, A.A, *Theologi Crusis di Asia. Pandangan-Pandangan Orang Krtisten Asia Mengenai Peneeritaan dalam sdalam Kemiskinan dan Keberagaman di Asia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989, hal 144.

¹¹ “Kelaparan di Yahukimo Baru Awal. Ajari Penduduk Bercocok Tanam”, *Kompas*, Edisi 12 Desember 2005. Hal. 1.

¹² A Special Issue Devoted to The Baptist, A People who Gathered “to Walk in all His Way”, *Christian History* Vol IV No 2. (terj. Suroso) Yogyakarta: Laksbang, 2005. hal . 75.

dipaksakan oleh negara. Jika hal itu dilakukan akan menyebabkan perang saudara yang dapat menindas suara hati. Mereka berupaya mengusahakan peribadatan yang berbeda dengan yang diakui negara. Umat baptis pertama pada dasarnya menentang negara yang campur tangan dalam urusan keagamaan. Dalam deklarasinya mereka mengatakan bahwa Raja merupakan manusia fana (biasa) dan bukan Tuhan, oleh karena itu Ia tidak memiliki kekuasaan atas Jiwa manusia. Jika Raja sudah berani berkuasa atas hukum-hukum yang spiritual, maka ia telah menjadikan dirinya Tuhan, bukan manusia.¹³

Persoalan yang muncul saat ini adalah kebebasan beragama di Inggris oleh orang-orang yang menamakan diri umat Baptis, justru paradok dengan keadaan orang-prang Baptis di Indonesia saat ini, khususnya dalam menjalankan kebebasan beragama, hubungan antara gereja dan negara. Umat Baptis Indonesia yang tergabung dalam GGBI menyatakan dalam suatu asas (doktrin baptis) bahwa kedudukan gereja terpisah dari negara. Gereja dan negara masing-masing memiliki kedudukan tersendiri. Gereja mengurus hal-hal keagamaan, tetapi hendaklah keduanya bekerja bersama-sama secara selaras dan berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran (Roma 13:1-7) Namun, nats Injil tersebut tampaknya agak berbeda dengan konteks yang dihadapi orang Baptis Indonesia terhadap pemerintahan Indonesia.

Dalam kenyataan sering dijumpai dalam praktik bergereja dijumpai anggota gereja yang terlibat aktif dalam kegiatan politik yang mengawasi jalannya pemerintahan secara pribadi, bukan wakil dari institusi gereja. Dalam hubungannya dengan kontekstualisasi bergereja, dapatkah institusi Baptis memberi kritik, sikap, dan pernyataan kepada pemerintah perihal pemiskinan, pembodohan, dan ketidakadilan. Kalau dicermati sistem organisasi GGBI yang memiliki organisasi tingkat pusat dan tingkat daerah sesungguhnya juga cerminan organisasi nongereja yang dapat berpartisipasi dalam dunia politik, seperti yang dilakukan mula-mula oleh gereja baptis di Inggris.

Apakah gereja Baptis juga mengagendakan kritik agar semua warga negara dapat memperoleh pendidikan yang mudah, dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan mudah dan murah, dapat memperoleh pekerjaan yang layak, dan memperoleh perlindungan dan keamanan seperti yang diamanatkan undang-

¹³ Andreas Bambang Subagyo, dkk, *Kepercayaan Baptis Indonesia: Dirinya dan Kepercayaan Gereja Lain*, Jakarta: GGBI, 2005 hal. 34.

undang dasar 1945. Jika gereja Baptis ingin melakukan kontekstualisasi bergereja dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, terlebih menolong dan mendahulukan mereka yang miskin dan tertindas tentu akan disambut oleh warga gereja karena sesuai dengan ajaran Injil.

Menurut pengamatan penulis, sampai saat ini Gereja Baptis mempraktikkan pembinaan warga dengan memperhitungkan faktor-faktor psikologis, metode pembinaan yang tanpa terasa sebenarnya bersifat indoktrinatif. Kegiatan memobilisasi anggota (baru) secara berencana dan menghasilkan pengikut-pengikut yang sangat militan dan berdedikasi tinggi. Bahkan hampir fanatik. Keadaan ini seringkali menghasilkan friksi antargereja khususnya di akar rumput (*grassroot*) berkait dengan interelasi di kalangan umat dan antarpemeluk agama.

Tidak jarang dijumpai kecurigaan dan salah pengertian dalam aksi penginjilan. Lebih jauh lagi banyak anggota bersifat eksklusif. Mengklaim dirinya sebagai orang Kristen yang injili dengan mendirikan lembaga-lembaga, sekolah teologi baik yang di tingkat nasional, regional dan lokal. Menurut Eka Darmaputera, ketegangan dan polarisasi dan ketegangan di tingkat nasional itu hanya bersifat sementara, namun di tingkat akar rumput keadannya semakin kritis dan serius.¹⁴

Dalam bergereja kebutuhan yang dirasakan jemaat dapat dirasakan sehingga mereka mendapatkan “sesuatu” dalam kegiatan bergereja. Respon seperti “*Khotbah-khotbahnya menyangkut masalah praktis sehari-hari*”, *Nyanyian-nyanyiannya menggerakkan dan menggetarkan hati*”, “*Suasananya akrab, hangat, dan hidup, membuat saya betah*”, “*Saya baru tahu apa yang harus saya lakukan sebagai orang Kristen*”, seharusnya ada di setiap praktik bergereja termasuk di gereja Baptis. Dalam bahasa yang sederhana gereja mampu mempraktikkan teologi kontekstual yang berkait dengan kehidupan mereka sehari-hari sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Jemaat merasa memperoleh jawaban jelas terhadap bagaimana hidup sebagai warga gereja yang seharusnya. Petunjuk yang jelas mengenai apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka sehari-hari. Suatu suasana yang membantu menguatkan mereka dalam pergumulan hidup sehari-hari.¹⁵

¹⁴ “Eka Darmaputera, Menuju Teologi Kontekstual di Indonesia”, *Konteks Berteologi di Indonesia*, Jakarta: BPK Guning Mulia, 1998, Hal. 4.

¹⁵ *Ibid*, hal.6.

Namun demikian, tidak jarang gereja baptis juga menawarkan fundamentalisme yang sama sekali lain. Bahkan tidak ada kompromi terhadap pemikiran baru yang lebih kontekstual. Sebagai contoh, pengambilan keputusan untuk melakukan pembaruan di organisasi di tubuh GGBI ditolak oleh peserta Kongres. Dari 94 suara 49 orang menolak materi yang diusulkan oleh Steering Committee Organisasi, artinya peserta kongres masih menghendaki bentuk struktur organisasi dalam AD/ART lama, 39 orang mendukung perubahan organisasi, dan 6 orang abstain. Implikasi dari penolakan modernisasi organisasi modern sesuai dengan perubahan zaman masih tidak diakomodasi oleh gereja di zaman modern.¹⁶ Di sisi lain, adanya pemikiran baru, untuk memasukkan mengeluarkan syarat pria sebagai diakon, karena GBI tidak mengizinkan wanita menjadi diakon.¹⁷

Sebagai tindak lanjut Badan Pengurus Pusat GGBI mengadakan lokakarya yang dihadiri para teolog baptis dari dua kubu Southern Baptist dan para pembela feminis bertema “Peran Wanita dalam gereja” yang akan memberikan “fatwa” Gereja Baptis pada Sidang Badan Perwakilan Gereja pada awal Januari 2006 di Salatiga. Pembahasan artikel subtema seperti “ Alkitab dari Sudut Pandang Perempuan dan Isi-Isu Feminisme”, “Perempuan dalam Konstruksi Budaya” “Pengarutamaan Peran Perempuan dalam gereja”, “Pendeta dan Diakon Perempuan: Sebuah Tinjauan Alkitab”, “Peran Perempuan dalam Sejarah Gereja” merupakan pemikiran inovatif gereja Baptis dalam rangka kontekstualisasi. Konsep keberbedaan pandangan berteologi di kalangan orang muda Baptis Indonesia ini merupakan awal dialog teologi kontekstual yang belum terbiasa di kalangan baptis.

E. Kritik Terhadap Doktrin Gereja Baptis

Kritik terhadap doktrin baptis ini didasarkan pada teori doktrin pemikiran Linberg.¹⁸ Teori doktrin gereja memberikan kritik untuk menguji problem kebermanfaatan doktrin, menjelaskan peran doktrin untuk menjawab problem-problem religi yang doktrinal, dan menjelaskan tipe-tipe doktrin.

Doktrin dideskripsikan ke alam empat hal untuk dielaborasi. *Pertama*, referensi untuk menjelaskan doktrin dilihat dari kredo kekristenan “*creedless*

¹⁶ Minit Kongres VIII GGBI, Yogyakarta: GGBI, 7-11 Maret 2005, hal. 128.

¹⁷ Ibid, hal. 207.

¹⁸ Linberg, George A, *The Nature of Doctrine : Religion and Theology in Postliberal Age.*, London: SPCK, 1984. p.73-90.

Christiannity” dari pengikutnya, sementara dipihak lain ada credo “*no creed but the Bible*”. *Kedua*, perlunya elaborasi antara aksi dan doktrin baku (*official doctrine*). Sebagai contoh, “Tuhan itu kasih”. Konsep itu baku dan ada di semua agama. Persoalannya bagaimana melakukan aksi dan elaborasi kasih itu dalam kehidupan umat beragama. *Ketiga*, terjadinya kontroversi ketika mengimplisitkan doktrin menjadi eksplisit dan operasional. Seringkali dalam mengeksplisitkan dogma terjadi konflik karena beberapa hal (a) mereka harus memahami istilah yang akan digunakan; (b) doktrin baku mengacu pada hal yang penting dan berorientasi pada keyakinan umat. *Keempat*, doktrin itu sangat berharga dan memiliki keawetan.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam doktrin adalah linguistik kultural. Dengan memberikan analogi linguistik, seorang dapat membedakan kosakata dan tatabahasa. Kosakata merupakan simbol, konsep, ritus, dan perintah. Sebagai contoh, Doktrin bahwa *Jesus Kristus adalah Juru Selamat* merupakan pembenaran tentang kanon Perjanjian Baru. Doktrin *Sola Gratia* atau *Sola Fide* dalam kekristenan merupakan pernyataan umum kristen.¹⁹

Berdasarkan teori doktrin yang dikemukakan, di bawah ini dikemukakan paradok yang dilakukan Gereja Baptis Indonesia dalam menerapkan doktrin Baptis dalam bergereja. Persoalan pengingkaran terhadap doktrin yang diyakininya tampak dalam keputusan-keputusan yang diambil secara melembaga seperti berikut ini.

1. Persetujuan asas Tunggal Pancasila dalam kehidupan bernegara termasuk beragama

Dalam Pedoman Pernyataan Asas-Asas Kepercayaan (*Doctrinal Statement*) Gabungan Gereja Baptis Indonesia butir 9.10 disebutkan bahwa kedudukan gereja terpisah dari negara: berarti gereja dan negara masing-masing berkedudukan tersendiri. Gereja mengurus hal-hal yang bersifat keagamaan dan negara mengurus hal-hal kenegaraan, tetapi keduanya hendaklah bekerja bersama-sama selaras dalam berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. (Roma 13:1-7; Markus 12:17)²⁰

¹⁹ Ibid hal 81.

²⁰ “Ketetapan Kongres VIII Tahun 2005 Gabungan gereja Baptis Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Asas Kepercayaan dan Pedoman Pelayanan Pejabat Gereja Baptis Indonesia” dalam *Minit Kongres VIII GGBI*, Yogyakarta 7-11 Maert 2005, hal.433.

Kesetujuan penerimaan asas tunggal Pancasila dalam organisasi gereja Baptis jelas bertentangan dengan doktrin awal yang dirumuskan oleh para pendiri gereja Baptis mula-mula. Kebebasan beragama yang diperjuangkan oleh pendiri Baptis mula-mula didasarkan respon terhadap pemerintah yang mengatur kehidupan bergereja. Oleh karena itu, penerimaan asas tunggal Pancasila merupakan pengingkaran terhadap otonomi gereja dari negara.

Terhadap pengingkaran doktrin ini, Gereja Baptis harus memiliki pandangan yang tegas apakah gereja dikelola secara otonom lepas dari negara atau sebaliknya agama memiliki relasi dengan negara. Pandangan pertama, lebih berkaitan dengan *dimensi internal* agama. Seberapa jauh agama dianggap menyediakan cetak biru (blue print) yang mengatur seluruh kehidupan, termasuk relasi agama dan politik., ataukah sebaliknya, agama dianggap wilayah *private*, yang tidak ada sangkut pautnya terhadap penyelenggaraan negara. Pandangan kedua, lebih berkaitan dengan *dimensi eksternal* yang berkaitan dengan pemahaman penyelenggaraan negara terhadap nilai-nilai agama, bagaimana harus diletakkan. Apakah agama dipahami sebagai wilayah yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara, sebagaimana yang lazim dianut teori modernisasi yang menggunakan prinsip sekularisasi.²¹

Tampaknya gereja Baptis lebih memilih pendekatan kedua. Sayangnya tidak konsisten dengan doktrin semula, bahwa seharusnya gereja dapat mengoreksi praksis bernegara yang bertentangan dengan nilai-nilai doktrinal yang dianutnya. Orang Kristen Baptis juga diam saja ketika pemerintah meratifikasi Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengacak-acak wilayah privat kehidupan beragama dengan pengaturan pembelajaran agama yang bersifat memaksa.

2. Kekhilafan Umat Baptis yang tidak mengakui eksistensi Saksi Yehofa

Senada dengan kealpaan seperti pada butir 1 ketika gereja Baptis menerima asas tunggal Pancasila. Kealpaan serupa dan amat fatal ikut-ikutan melarang aktivitas ibadah sekte Saksi Yehofa dalam kehidupan beragama. Aliran yang berpusat di Brooklyn Amerika Serikat ini pertama kali datang di Indonesia pada 1931 yang kemudian mendapat pengesahan berdasarkan

²¹ Anas Saidi (Editor), *Menekuk Agama Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru*. Depok: Desantara, 2004, hal 3.

Ketetapan Menteri kehakiman RI tanggal 19 Juli 1964 No. J.A./5/86/1 kemudian dikukuhkan dengan SK Menteri Agama RI tanggal 11 Mei 1968 No. MA/144/1968 yang ditandatangani Menteri Agama KH. Muhammad Dahlan dari Partai Nahdatul Ulama yang menyatakan bahwa Perkumpulan Siswa Alkitab (Saksi Yehofa) mempunyai hak hidup dan mempunyai hak untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang mission, sebagaimana juga halnya dengan organisasi-organisasi misi lainnya dalam melaksanakan kegiatan mereka.²²

Kesalahan yang dituduhkan kepada Saksi Yehofa adalah bahwa mereka memiliki ajaran bahwa penghormatan terhadap bendera dengan tidak mengangkat tangan, tetapi berdasarkan esensinya. Masing-masing pengikut saksi Yehofa memiliki bendera di rumah yang dikibarkan setiap hari besar nasional yang dianjurkan pemerintah. Kesalahan kedua adalah mengenai transfusi darah. Keputusan untuk melakukan transfusi darah sangat diputuskan dari hati nurani masing-masing anggota, tidak diputuskan oleh agama. Terhadap dua hal itu, pemerintah melalui kejaksaan agung dengan SK Jaksa Agung Nomor Kep JA/12/1976 yang ditandatangani Ali Said, S.H melarang keberadaan Saksi Yehofa. Bahkan Dirjen Bimas Kristen PN Harefa mengecam KH. Muhamad Dahlan yang menganggap terburu-buru memberi rekomendasi Saksi Yehofa sebelum konsultasi dengan Bimas Kristen. Padahal pimpinan Saksi Yehofa menegaskan bahwa Saksi Yehofa percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ditegaskan pula bahwa Saksi Yehofa percaya pada Yesus Kristus sebagai Anak Allah yang diutus Allah Yehofa ke dunia sebagai Juru Selamat dan penebus dosa dunia sebagaimana terdapat dalam Yohanes 3:16.²³

Namun, tuduhan tetap dilaksanakan bahwa Saksi Yehofa tidak memenuhi kriteria Kristen, yaitu pertama, mengakui dan mempergunakan Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian baru); Kedua, Mengakui dan mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pernyataan tersebut dirumuskan berdasarkan Kesepakatan Bersama dari PGI, PII, gabungan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), dan Gabungan Gereja Baptis Indonesia (GGBI). Asumsi tersebut

²² Ibid. hal 177.

²³ Anas Saidi, *Menekuk Agama Membangun Tahta, Kebijakan Agama Orde Baru*, Depok, Desantara, 2004. Hal. 177.

jelas berbeda dengan pengakuan Saksi Yehofa yang mengakui Alkitab dan Yesus sebagai Anak Allah dan Tuhan Juru Selamat Dunia. Pelarangan terhadap keberadaan saksi Jehova jelas bertentangan dengan doktrin baptis mula-mula.

3. Dukungan Politik kepada Presiden Soeharto dengan pengerahan Jemaat untuk m pengumpulan emas kepada Soeharto

Perlakuan negara terhadap agama Kristen Protestan berbeda dengan Kristen Katholik atau pun Islam. Pengaruh hubungan negara terhadap agama Protestan lebih dalam ketimbang Katholik. Hal itu disebabkan disamping agama Katholik punya hierarki kepausan yang terpusat dan tiak mudah ditaklukkan oleh penguasa. Berbeda dengan agama Kristen walaupun memiliki lembaga-lembaga terpusat seperti Dewan Gereja Dunia (DGI, maupun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Persekutuan Injil Indonesia, Gabungan Gereja Baptis, Dewan Pantekosta, dll,) tetapi hanya bersifat organisatorik dan keputusannya bukan merupakan hierarki keagamaan yang mengikat. Selain itu, Protestan memiliki denominasi dan sekte yang sangat banyak. Dengan pintu-pintu perbedaan ini, membuat negara lebih mudah melakukan kooptasi atau campur tangan

Dua momentum penting kooptasi negara pada agama adalah pembaruan sistem sosial politik pasca peristiwa Gerakan 30 September yang membunuh tidak kurang 1,5 juta orang dan momentum pembangunan nasional yang mengharuskan agama patuh kepada kebijakan negara, sebab negara dianggap benar. Pada momentum pertama, agama patuh pada negara tanpa *reserve* terhadap hantu komunis yang diciptakan pemerintah. Pendeknya semua orang yang tidak mau dicap komunis harus beragama dan atau bergereja. Pada momentum kedua, negara makin percaya diri dalam menjalankan kebijakan termasuk menundukkan organisasi agama di bawah telapak tangan kekuasaannya.

Kooptasi negara pada agama itu tercermin, ketika terjadi penyerderhanan paratai dan Partai Kristen Oindoensia (Parkindo) berfusi pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kenyataannya, aspirasi Kristen tidak otomatis ke PDI. Sebagai contoh, di daerah Tapanuli Utara yang penduduknya mayoritas Kristen, pemilu di daerah itu 100% dimenangkan Golkar dan Ketua (Ephorus) HKBP Dr. TS Sihombing, bersedia mewakili Golkar untuk jabatan di lembaga tinggi negara.

Keterpurukan negara akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditandai merosotnya nilai tukar rupiah, meningkatnya jumlah pengangguran, dan

merosotnya sumberdaya manusia menjelang 1997 sebetulnya bukti ketidakmampuan pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran seperti diamantkan Undang-Undang dasar 1945. Sayangnya gereja tidak bersikap kritis terhadap kooptasi negara terhadap agama yang dilakukan oleh rejim Soeharto selama tiga dasawarsa berkuasa.

Menghadapi keadaan yang demikian seharusnya gereja memberi suara kenabian, untuk mengkritik dan memberi solusi kepada pemerintah atas keterpurukan bangsa. Sebab selama ini, gereja justru dibungkam untuk melakukan aktivitas dan advokasi pemberdayaan masyarakat. Padahal selama krisis, gereja telah melakukan berbagai kegiatan sosial yang meringankan beban masyarakat yang kelaparan. Kegiatan pemberian sembako, kepada masyarakat akan lebih berguna daripada memberi emas kepada negara.

Paradok yang dilakukan oleh pemimpin gereja dengan memberi sumbangan emas kepada negara melalui Presiden Soeharto dan Anaknya Tri Hardianti Rukmana (mbak Tutut) hanya merupakan bentuk ketundukan agama pada kekuasaan. Tidakkah ajaran gereja mula-mula untuk mengasihi yang miskin dan yang papa. Tidakkah Yesus selalu berpihak pada mereka yang menjadi korban, kaum miskin dan mendetita dengan menjalani kesetiakawanan terhadap mereka.²⁴

Sungguh ironis, jika gereja justru berpihak pada penguasa bukan kepada mereka yang tertindas dan korban. Tertindas karena kebijakan yang telah dilakukan negara yang menyebabkan pemiskinan dan pembodohan. Tertindas sehingga tidak menyadari kalau dibodohkan. Hal ini sudah terjadi pada oknum-oknum Kraisten yang membebek pada penguasa bukan untuk kepentingan gereja tetapi kepentingan pribadi yang jelas bertentangan dengan ajaran gereja.

F. Refleksi Theologis Praksis Bergereja

Untuk mengakhiri pembahasan doktrin pemisahan gereja dan negara dalam gereja Baptis, dikutip refleksi teologis John Locke tentang gereja.

A church then I take to be a voluntary Society of Men, Joining themselves together of their own accord, in order to the public worshipping of God, in such a manner as they judge acceptable to him, and effectual to the Salvation of their Souls..... No Body is born a member of any church.²⁵

²⁴ Banawiratma, S.J, 10 Agenda Pastoral Transformatif. Yogyakarta: Kanisius, 2002, hal. 45.

²⁵ Locke, John, *A Letter Concerning Toleration*. London:Hackett Publishing Company, 1983. p. 28.

Pernyataan John Locke tersebut paralel dengan pemikiran Richard Niebur, bahwa Injil dapat mentransformasikan budaya salah satunya hukum adat. Artinya, Injil dapat menentang maupun mendukung keberadaan budaya sepanjang hal itu tetap memposisikan pada mereka yang menjadi korban dan teraniaya. Sebab pada mulanya yang ada hanyalah persekutuan orang-orang percaya, bukan gereja. Doktrin yang disusun hendaklah tidak bertentangan dengan kebenaran ajaran Tuhan.

Gereja dapat melakukan tindakan-tindakan budaya yang justru tidak membunuh kemerdekaan, kebebasan, kreativitas dan memenjarakan hak asasi manusia. Moralitas Kristen lebih banyak ditentukan oleh tradisi yang tidak bertentangan dengan Ajaran Yesus tentang pembelaan terhadap mereka yang miskin, terhina, dan menjadi korban.

Gereja baptis yang masih perfesiones dalam menjalankan dogma yang dirumuskan para pendirinya, sudah saatnya gereja mengikuti zaman, berkontekstualisasi dalam berteologi atau berteologi multikultural yang mengindonesia sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Jika hal itu dilakukan akan muncul interelasi antarumat Kristen dalam memerangi ketidakadilan, selain agenda utama melaksanakan Amanat Agung untuk mengenalkan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat Dunia dengan berusaha terus menegakkan keadilan.

Daftar Pustaka

- Andreas Bambang Subagyo, dkk, *Kepercayaan Baptis Indonesia: Dirinya dan Kepercayaan Gereja Lain*, Jakarta: GGBI, 2005.
- Anas Saidi (Editor), *Menekuk Agama Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru*. Depok: Desantara, 2004.
- “A Special Issue Devoted to The Baptist, A People who Gathered to walk in His Way” dalam *Christian History*, Vol IV. No 2, Yogyakarta: Laksbang. 2005
- Banawiratma, J.B., *10 Agenda pastoral Transformatif, Menuju Pemberdayaan Kaum Miskindengan Perspektif Adil Gender, HAM, dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Budi Suwondo, “Menjadi Gereja Baptis Indonesia Kontekstualisasi Setengah Jalan” dalam *Menjadi Gereja Baptis Indonesia*, Bandung: LLB, 2001.
- “Eka Darmaputera, Menuju Teologi Kontekstual di Indonesia”, *Konteks Berteologi di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998.
- Linberg, George A, *The Nature of Doctrine : Religion and Theology in Postliberal Age*. , London: SPCK, 1984.
- Locke, John, *A Letter Concerning Toleration*. London:Hackett Publishing Company, 1983.
- Minit Kongres VIII Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Yogyakarta: GGBI, 7-11 Maret 2005.
- Niebuhr, Richard, *Christ and Culture*, New York:Harper Torchbook, 1956.
- Rankin, Jerry, “Partnership out of Conflict The Evolving Relationship between GGBI and MBI” dalam *Menjadi Gereja Baptis Indonesia*. Jakarta: LLB, 2001.
- Weber, Max, *Etika Protestan dan Kapitalisme*, Surabaya: Pustaka Promethea, 2000.